

PERAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM MENSTABILKAN KONDISI PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1973)

oleh :

Novi Gustriyanti, E.Wagiyah, Anggar Kaswati

Abstrak

Sultan Hamengku Buwono IX atau Dorojatun lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April 1912 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 Rabingulakir tahun Jumangkir 1842 di Sompilan, jalan Ngasem 13 Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan nama Pakuningratan. Beliau merupakan putera dari Pangeran Haryo Purboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII) dengan Raden Ayu Kustilah. Pada masa kecil Dorojatun mulai sekolah di Frabel, kemudian melanjutkan ke Een B dan setelah lulus melanjutkan ke Hentrake Europpeze Lagere di jalan Kaliurang. Setelah umur 13 tahun sekolah di HBS Semarang dan pindah ke HBS di Bandung. Pada bulan Maret 1930 Dorojatun bersama B.R.M Tinggata (kakaknya) dan ditemani Hofland pergi ke Belanda dan bersekolah di Gymanasium di kota Harlem. Kuliah di Rjjsuniversiteit serta mengambil jurusan hukum dan ekonomi.

Pada bulan Oktober 1939 Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memerintahkan Dorojatun pulang ke keraton Yogyakarta, setiba ditanjung priok dijemput keluarga di hotel "Der Indees" Dorojatun disertai keris pusaka kraton "Kyai Jaka Piturun". Pada 18 Maret 1940 atau 8 Sapar tahun Dal 1871 Dorojatun diangkat menjadi raja dan bergelar "Sampean Dalem Inkgang Sinuwan Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabudurakhman Sayidin Kalifatullah Kaping IX. Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada awal Orde Baru adalah melakukan misi-misi ekonomi ke mancanegara untuk menjadwalkan pengembalian utang-utang Indonesia terhadap negara-negara lain.

Kata Kunci : Sri Sultan HB IX - Perekonomian Indonesia - Orde Baru

Latar Belakang

Sri Sultan Hamengku Buwono IX lahir pada masa pemerintahan Belanda. Beliau dilahirkan di Dalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912. Beliau merupakan anak ke-sembilan dari BRM. Sewaktu Dorojatun menjadi mahasiswa di Rijk Universiteit Leiden Belanda studinya dijalani dengan sepenuh hati, selain itu ia juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Beliau juga masuk perkumpulan Verenigde Facultien, di organisasi ini ia pernah menjabat sebagai ketua organisasi. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai komisaris dalam lingkungan pengurusnya. Selama berada di Belanda

Hengkie telah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perpolitikan dan ekonomi Negara-negara pada umumnya ketika itu. Selain itu, ia juga rajin menghadiri kelompok-kelompok diskusi dalam lingkungan universitas yang dipimpin langsung oleh guru besarnya yang sangat disegani yaitu Prof. Schrieke. (Sutrisno Kutoyo, 1996 : 55).

Awal Januari 1946 Pemerintah RI menerima undangan untuk memindahkan kedudukan ibu kota di Jakarta ke Kasultanan Yogyakarta yang kemudian menjadi jantung gerakan kemerdekaan. Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis. Melihat keadaan perekonomian yang semakin terpuruk, maka kemudian Sri Sultan mengemukakan konsep mengenai pembangunan sosial-ekonomi. Sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sri Sultan berjasa meletakkan dasar dan arahan bagi kelanjutan pembangunan itu sendiri (Selo Sumarjan, 1986 : 23).

Latar Belakang Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono

Sultan Hamengku Buwono IX lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April 1912 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 *Rabingulakir* tahun *Jumangkir* 1842 di Sompilan, jalan Ngasem 13 Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan nama Pakuningratan. Beliau merupakan putera dari Pangeran Haryo Purboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII) dengan Raden Ayu Kustilah. Setelah berumur lima hari atau *sepasar* ia diberinama Gusti Raden Mas Dorajatun. Nama ini mengandung makna bahwa kedua orang tuanya mempunyai harapan kelak dikemudian hari sang anak mampu memiliki derajat yang tinggi, dapat mengemban kedudukanyang luhur dan selalu memiliki budi pekerti yang baik meskipun memegang kekuasaan yang besar.

K.G.A.A.Hamengku Negara menitipkan putera-puteranya pada keluarga di Keratonagar putera-puteranya dididik secara sederhana,tidak diistimewakan,hidup secara disiplin agar berani menghadapi tantangan hidup yang penuh perjuangan. Hal ini

dilakukan oleh beliau karena beliau mengagap kidupan di dalam keraton yang penuh dengan sanjungan tidak akan menguntungkan bagi kemajuan putera-puteranya. Dorojatun adalah putera seorang raja yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Yogyakarta, sehingga beliau diterima di “*I Ste Eupopeesche Lagene Scool B* dan kondisi ini semacam ini menunjukkan adanya tindakan diskriminasi dalam masyarakat antar orang-orang Eropa dengan masyarakat pribumi. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kesadaran akan ketidaksamaan hal-hal yang dimiliki dan keadaannya (daerahnya) yang terjajah. Untuk selanjutnya dalam diri Dorojatun muncul keinginan untuk maju dan kebutuhan akan kebutuhan pendidikan, bahkan kesadaran muncul menentang penjajah (K Tino, 2010 : 134).

Pada umur 13 tahun Dorojatun lulus dari *Neutrale Europese Lagere School* di jalan pakem kemudian beliau melanjutkan ke *Hogere Burger School* dikenal dengan nama HBS di Semarang. Di sana Dorojatun dipondokan pada keluarga Tj. Voskuil Semarang. Karena kondisi iklim di Semarang panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Dorojatun maka ayahnya memutuskan untuk mengambil anaknya tahun 1927. Selanjutnya Dorojatun dikirim ke Bandung dan di titipkan kepada keluarga De Boer dan masih sekolah di HBS Bandung.

Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, kekuasaan kraton Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Dr. Lucien Adam agar tidak terjadi kevakuman kekuasaan. Gubernur Adam kemudian membentuk panitia yang berjumlah 5 orang yang diketuai Dorojatun kelima orang itu adalah Dorojatun, G.P.H Mangkubumi, (paman Dorojatun), G.P.H Tejokusumo (paman Dorojatun), Pangeran Ngabehi dan Pangeran Purbaya (kakak Dorojatun). Meskipun Sri Sultan Hamengku Buwono VIII menghendaki agar Dorojatun yang menggantikannya, tetapi untuk naik tahta menemui beberapa hambatan. Hambatan itu berasal dari pemerintahan kolonial Belanda (Djoko Dwiyanto, 2009 : 468). Kepemimpinan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena adanya hambatan pihak Belanda. Pihak penjajah tidak menginginkan Dorojatun menggantikan kekuasaan ayahnya sebagai Raja di Keraton dan menunjuk Dr. Lucien Adam sebagai Gubernur (Darban et al., 1998 : 6).

Kondisi Politik dan Ekonomi pada masa Orde Baru

Setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 dan terdapat bukti-bukti bahwa PKI berada di belakang peristiwa pemberontakan di berbagai daerah, Mayjen Soeharto selaku staf Koti membekukan PKI dan Ormas-ormasnya. Kebijakan tersebut dijalankan oleh para panglima di daerah. Selain itu, pada 12 November 1965 mengeluarkan Instruksi Hankam Nomor 1015/65 tentang pembersihan personil yang terlibat atau terindikasi terlibat G 30 S/PKI. Untuk pegawai negeri sipil, dikeluarkan Instruksi Koti Nomor 22/65. Namun instruksi tersebut ditarik kembali oleh Presiden Soekarno dan penyelesaiannya diserahkan kepada Presidium, yaitu Waperdam Subandrio.

Upaya pembersihan PKI juga dilakukan di dalam DPRGR. Pimpinan DPRGR pada Nopember 1965 membekukan keanggotaan DPRGR fraksi PKI yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRGR Nomor 10/Pimp/I/65-66 dan disusul dengan Keputusan Nomor 13/Pimp/I/1965-1966. Berdasarkan dua keputusan pimpinan DPRGR tersebut, 62 anggota DPRGR dibekukan sehingga jumlah anggota DPRGR menjadi 237 orang. Keputusan itu didukung oleh hasil Sidang Paripurna DPRGR yang diselenggarakan pada 15 Nopember 1965.

Kemerosotan ekonomi yang terjadi pada masa awal Orde Baru dengan mudah mendatangkan kritik. Ada tiga seminar yang berpengaruh besar dalam memberikan bentuk yang lebih konkret terhadap gagasan pembangunan Ekonomi dan Politik Orde Baru. Pertama adalah “Pekan Ceramah dan Seminar Ekonomi Keuangan dan Moneter” tanggal 10 Januari 1966, ke dua adalah Symposium “Kebangkitan Semangat 66 :Mendjelajah Trace Baru” tanggal 6-9 Mei 1966, seminar ke tiga adalah Seminar II Angkatan Darat di Bandung tanggal 25-31 Agustus 1966 (Adi Sudirman, 2014: 389).

Pada tanggal 26 juli 1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Kabinet Ampera. Penyusuaian mulai tampak nyata, setidaknya sejak Soeharto dilantik sebagai “Pejabat Presiden” dalam SU MPRS 1966. Di samping membentuk kabinet “Ampera” Soeharto juga mengangkat sejumlah staff pribadi yang terdiri dari para perwira Angkatan Darat, seperti Letjen Panggabean, Mayjen Basuki Rahmat, Mayjen Ibnu Sutowo, Soedjono Hoemardani, Ali Murtopo, dan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Tahun 1966 dalam sejarah perekonomian Indonesia adalah tahun

penyelamatan rakyat dan alat-alat produksi dari kehancuran. Pada pembentukan Kabinet Dwikora yang disempurnakan (Kabinet 100 Menteri), 24 Februari Sri Sultan diangkat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan. Tanggal 28 Maret 1966 tidak lama setelah diberlakukannya surat perintah 11 Maret 1966 dan dibubarkannya PKI beserta ormas-ormnasnya, kabinet diubah lagi sehingga menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan Sri Sultan sebagai anggota Presidium Wakil Perdana Menteri IV/ Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. (Taufik Abdullah, 2013:214)

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Muhibah Ekonomi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
2. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pemulihan hubungan dengan negara-negara kreditor menjadi agenda yang sangat mendesak. Pemulihan ini guna mengejar dua target sekaligus. Pertama, penjadwalan ulang hutang luar negeri yang sudah sangat berat. Ke dua, adalah memperoleh dana pinjaman baru guna menopang anggaran belanja Negara. Sebagai gambaran, pada tahun 1965 jumlah hutang luar negeri mencapai 2.358 juta dolar. Dari jumlah ini 59,5% berasal dari Negara-negara komunis, 24,8% berasal dari negara-negara Barat, dan 11% berasal dari negara Asia khususnya Jepang (Ahmad Adaby Darban, 1998 : 8).

Langkah strategis adalah ketika pemerintah mengundang IMF. Tim IMF yang sudah berada di Jakarta bekerja keras membantu Staf Pribadi pejabat Presiden yang berasal dari sipil yaitu Widjoyo Nitisarto, Ali Wardhana, Sadli, Subroto, dan Emil Salim dalam perumusan detail rencana kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. Di Washington, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menghadiri sidang tahunan IMF dan Bank Dunia, dalam sidang tersebut ia menyatakan bahwa Indonesia ingin kembali menjadi anggota kedua lembaga tersebut. Alhasil, dari muhibah ekonomi selama 40 hari tersebut adalah diperolehnya kredit baru sebanyak 120 juta dollar AS untuk import kebutuhan pokok dan *spareparts*(*bahan kebutuhan pembangunan*) dalam rangka operasi penyelamatan, dan 167 juta dolar AS sebagai hasil kembali berlakunya bantuan-bantuan yang dibekukan, dan beberapa bantuan yang dialihkan penggunaannya dari tujuan konsumtif ke *spareparts* atau tujuan yang lebih produktif.

Untuk menindaklanjuti hasil muhibah ekonomi yang telah dilakukan oleh Sri Sultan HB IX dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian Indonesia, Pemerintah kemudian menyiapkan paket kebijakan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Paket ini berupa keputusan Presidium Kabinet mengenai ekspor/impor, penyediaan dana devisa, penegasan tanggung jawab dalam bidang ekspor dan 3 instruksi Presidium tentang pelancaran ekspor, tentang pedoman penentuan harga (Taufik Abdullah, 2013: 324).

Simpulan

Sultan Hamengku Buwono IX atau Dorojatun lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April 1912 atau menurut hitungan jawa jatuh pada tanggal 25 *Rabingulakir* tahun *Jumangkir* 1842 di Sompilan, jalan Ngasem 13 Yogyakarta yang sekarang dikenal

dengan nama Pakuningratan. Beliau merupakan putera dari Pangeran Haryo Purboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII) dengan Raden Ayu Kustilah.

Pada bulan Oktober 1939 Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memerintahkan Dorojatun pulang ke keraton Yogyakarta setiba ditanjung priok dijemput keluarga di hotel “Des Indees” Dorojatun disertai keris pusaka kraton *Kyai Jaka Piturun*. Pada 18 Maret 1940 atau 8 *sapar* tahun *Dal* 1871 Dorojatun diangkat menjadi raja dan bergelar “*Sampean Dalem Ingkang Sinuwan Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabudurakhman Sayidin Kalifatullah Kaping IX*”. Kemerosotan ekonomi yang terjadi pada masa awal Orde Baru dengan mudah mendatangkan kritik. Ada tiga seminar yang berpengaruh besar dalam memberikan bentuk yang lebih konkret terhadap gagasan pembangunan Ekonomi dan Politik Orde Baru. Pertama adalah “Pekan Ceramah dan Seminar Ekonomi Keuangan dan Moneter” tanggal 10 Januari 1966, kedua adalah Symposium “Kebangkitan Semangat 66 : Mendjelajah Trace Baru” tanggal 6-9 Mei 1966, seminar ketiga adalah Seminar II Angkatan Darat di Bandung tanggal 25-31 Agustus 1966.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada awal Orde Baru adalah melakukan misi-misi ekonomi ke mancanegara untuk menjadwalkan pengembalian utang-utang Indonesia terhadap Negara-negara lain dan untuk menjajaki kemungkinan memperoleh utang baru sebagai modal rehabilitasi dan pembanguan ekonomi, yang saat itu Sultan sebagai Menteri Koordinator ekonomi, keuangan, dan industri. Pada tanggal 24 Maret 1973 Sri Sultan diangkat menjadi wakil Presiden RI.

Daftar Pustaka

- Adi Sudirman. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta : Diva Press
- Ahmad Darban dkk. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta : CV. Eka Dharma.
- Atmakusuma, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta : C. V Eka Dharma.
- Argo Twikromo.Y , 2000, *Ratu Kidul*, Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya.
- Depdikbud, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta : C V Eka Dharma.
- Djoened Marwati dan Nugroho Notosusanto, 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Jendral Soeharto. 1967 . Orde Baru (*Kutipan dari Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April*).Grip. Surabaya . Halaman 7
- Kartodirjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia.
- Kementrian Penerangan RI, 1953, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta : BPN.
- K Tino. 2010. *Dari Serangan Umum 1 Maret sampai Melawan Suharto*. Yogyakarta : Navila Edia.
- Kutoyo, Sutrisno, 1996, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Riwayat Hidup dan Perjuangan*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Louis Gotschalk, 1986. *Pengertian Sejarah, Pengantar Metode Sejarah*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.